

Analisis Kinerja Finansial dan Nonfinansial Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT

Dewi Sartika^{a*}, Fitrah Mulyani^b

^aUniversitas Dharma Andalas Padang, dsartika959@yahoo.com, Indonesia

^bUniversitas Dharma Andalas Padang, Indonesia

Abstract. The poverty alleviation programs through KJKS BMT which was launched in 2010 as listed in APBD Padang City. This research is a descriptive research which used qualitative and quantitative approach. The purpose of this research is to know about the performance of financial and non financial as the program to overcome the poverty through KJKS BMT in Padang city. The researcher uses the primary and secondary data to gather the information for this research. For secondary data the researcher using several techniques, such as; semi structure interview technique, documentation technique, and observation technique. The data analysis method refers to the measurement of financial and non financial information performance. The benefits of this research are expected to make KJKS BMT as an intermediary between the media programs of poverty alleviation programs in community empowerment, forming a synergy between the programs with the same target group, and for the public, this study will be very useful for the general public to assess the seriousness and the performance of local governments in allocating the budget in an effort to overcome poverty. The results of the financial performance of the poverty alleviation program through KJKS BMT in Padang City from 2010 to 2015 showed an increase in value each year, the conditions were pretty good in 2011(27.36%). Non-financial performance evaluation results by using the input indicator is 81.14% which means Very Good. The Indicator of the process was 74%, which means Good. Results of the assessment of the output indicator is at 90% which means Very Good. Finally, an indicator of impact is 66.67%, which means Good.

Keywords: poverty; financial performance; non financial performance; KJKS BMT; alleviation

Pendahuluan

Organisasi Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi pada tata pemerintahan dalam era otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan

efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diharapkan ada *input* yang diperoleh dalam rangka perencanaan pembangunan sehingga tidak ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah baik program dan anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintah daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini mengakibatkan dua implikasi strategis yaitu, pertama: situasi desentralisasi politik dan keuangan telah

*Corresponding author. E-mail: dsartika959@yahoo.com

memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat daerah untuk menentukan arah, kebijakan, tujuan, program, hingga aktivitas organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan; kedua: pemerintah daerah telah diberi keleluasaan yang lebih besar untuk mendapatkan, mengelola dan mengalokasikan dana yang diperlukan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat (Harun, 2008; dalam Pilipus Ramandei, 2009).

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, berdampak pada perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi anggaran yang ditetapkan.

Pada masa otonomi daerah setiap *top management* pada tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota dipacu untuk berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan kinerja pembangunan wilayah yang harus diprioritaskan dalam tiga pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan, sebagai basis utama dalam penanggulangan kemiskinan pada tingkat daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 Ayat (1); menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dan pada Ayat (2); menyatakan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pada peraturan ini juga dijelaskan semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Banyak sistem penanggulangan kemiskinan diadopsi melalui kompensasi, seperti bantuan langsung pangan, *voucher* pelayanan minimum kesehatan dan pendidikan. Program-program demikian diakui hanya dapat memecahkan persoalan kemiskinan jangka pendek (*World Development Report*, 2004; dalam Elfindri, 2009). Mengingat ketika program telah berakhir, masyarakat miskin tetap memerlukannya. Di samping itu *target group* sebagai sasaran program sering tidak pada sasaran yang semestinya menerima sekaligus pemanfaatan dari bentuk pelayanan itu sendiri. Sementara sistem penanggulangan secara dinamis, berupa pengembangan usaha produktif serta bentuk dukungan kelembagaan dan pendampingan, diduga juga sering mengalami kendala (Elfindri dkk, 2007). Ironis memang, sementara setiap tahun program kemiskinan telah dilaksanakan dengan anggaran dana yang besar, sangat sulit sampai kepada sebuah kesimpulan pengurangan kemiskinan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang telah dilakukan.

Berbagai macam program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP/PNPM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK/PNPM), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), Program Prakarsa Pembangunan Tata Pemerintahan daerah (P2TPD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Kredit Usaha Tani (KUT), Penyediaan Beasiswa bagi keluarga miskin, memberikan perhatian atau tekanan pada kegiatan-kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan/perumahan, kegiatan sosial (pelatihan/beasiswa), peningkatan kemampuan dan keterampilan, peningkatan akses dan layanan bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin. Program-program di atas semua sumber pendanaannya berasal dari APBN/APBD.

Baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah mengalokasikan dana anggaran yang cukup besar untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik dalam bentuk belanja hibah, belanja bantuan sosial maupun dalam bentuk program/kegiatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2007 telah memberikan Kredit Mikro Nagari/Kelurahan (KMN/KMK) berupa bantuan modal usaha bagi keluarga miskin pada Nagari/Kelurahan. Program KMN/KMK ini merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan

yang merupakan *sharing* dana dari APBD propinsi dan APBD kab/kota.

Pada tahun 2007, Pemda Propinsi Sumbar mengalokasikan dana KMN/KMK sebesar Rp30.000.000.000,- untuk 100 Nagari/Kelurahan dan masing-masing Nagari/Kelurahan akan memperoleh dana sebesar Rp300.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2008, alokasi KMN/KMK bagi 84 nagari/kelurahan

dan pemda kab/kota diharuskan mengalokasikan dana dengan jumlah yang sama, sesuai dengan jumlah nagari/kelurahan yang dibantu oleh pemda propinsi. Untuk tahun anggaran 2009, telah ditetapkan 82 Nagari/Kelurahan penerima KMN/KMK yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat. Dengan alokasi dana per kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 1
Alokasi Dana KMN/KMK per Kabupaten/Kota Tahun 2008, 2009 dan 2010

Kab/Kota	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
	Nagari/Kel.	Jumlah Dana (Rp)	Nagari/Kel.	Jumlah Dana (Rp)	Nagari/Kel.	Jumlah Dana (Rp)
Kabupaten:						
Kep. Mentawai	-	-	-	-	-	-
Pesisir Selatan	6	1.800.000.000	-	-	-	-
Solok	7	2.100.000.000	5	1.500.000.000	1	300.000.000
Sijunjung	4	1.200.000.000	10	3.000.000.000	9	2.700.000.000
Tanah Datar	9	2.700.000.000	12	3.600.000.000	10	3.000.000.000
Padang Pariaman	7	2.100.000.000	8	2.400.000.000	-	-
Agam	10	3.000.000.000	23	6.900.000.000	-	-
Lima Puluh Kota	8	2.400.000.000	10	3.000.000.000	7	2.100.000.000
Pasaman	7	2.100.000.000	1	300.000.000	-	-
Solok Selatan	3	900.000.000	5	1.500.000.000	-	-
Dharmasraya	3	900.000.000	3	9.000.000.000	-	-
Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-
Kota:						
Padang	13	3.900.000.000	-	-	27	8.100.000.000
Solok	1	300.000.000	1	300.000.000	-	-
Sawahlunto	1	300.000.000	-	-	-	-
Padang Panjang	1	300.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000
Bukit Tinggi	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
Payakumbuh	2	600.000.000	-	-	-	-
Pariaman	1	300.000.000	1	300.000.000	-	-
TOTAL	84	25.200.000.000	82	24.600.000.000	57	17.100.000.000

Sumber: Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari/Kelurahan Tahun 2009 dan Surat Gubernur Sumbar No. 263/VII/KPKP-Sosbud/Bappeda-2010

Sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, Kota Padang merupakan ibu kota wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk miskin cukup besar, dengan data sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
2009	46.810
2010	52.800
2011	50.900
2012	45.940
2013	44.210

Sumber: BPS Provinsi Sumbar (Tahun 2009 - 2013)

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kota Padang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 52.800 KK. Hal ini bisa disebabkan karena bencana alam gempa bumi pada tanggal 30 September tahun 2009. Peningkatan ini menjadi tantangan kepada pemerintahan Kota Padang untuk

dapat menanggulangnya. Kemudian untuk tahun 2011 hingga tahun 2013 terus mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa Pemda Kota Padang sudah berusaha keras untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai program dan kegiatan yang ada.

Kota Padang merupakan kota dengan jumlah Kelurahan sebanyak 104 Kelurahan. Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat Kota Padang memperoleh alokasi dana anggaran program KMN/KMK paling besar pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp8.100.000.000,- dari APBD Propinsi Sumatera Barat. Dan pada tahun 2008 Pemda Kota Padang sudah merealisasikan alokasi dana anggaran melalui program KMN/KMK di 50 Kelurahan di Kota Padang dengan masing-masing Kelurahan memperoleh dan sebesar Rp300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 50 Kelurahan sebesar Rp15.000.000.000,. Namun setelah dievaluasi ternyata pengelolaan melalui program KMN/KMK kurang efektif dan Anggaran yang sudah direalisasikan sebanyak Rp15.000.000.000,- hanya

tinggal sekitar Rp2.000.000.000,- (sumber: Wakil Walikota Padang Bapak Mahyeldi dalam acara evaluasi kinerja manajer KJKS BMT se- Kota Padang, 10 November 2011). Berkaca dari Pemerintah Kabupaten Agam yang lebih dulu melahirkan KJKS BMT yang pertumbuhannya cukup pesat, maka pada tahun 2010 Pemerintahan Kota Padang merealisasikan alokasi anggaran Kredit Mikro Kelurahan (KMK) melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil (KJKS BMT) di 54 Kelurahan dengan masing-masing Kelurahan memperoleh dana sebesar Rp300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 54 kelurahan sebesar Rp16.200.000.000,-, alokasi dana anggaran ini berasal dari APBD Provinsi Sumbar dan Kota Padang (*Specific Grant*).

Meskipun berbagai macam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, namun dalam rangka peningkatan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan untuk menggerakkan perekonomian keluarga miskin, maka perlu dilakukan intervensi terhadap keluarga miskin melalui Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil (KJKS BMT) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum dan diharapkan berkelanjutan menjadi sebuah lembaga perantara antara berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada di SKPD ke rumah tangga sasaran maupun masyarakat yang membutuhkan.

Untuk di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT dengan sistem, prinsip, sasaran dan sumber anggaran yang sama yaitu *sharing* Pemda Kabupaten/Kota dan Pemda Propinsi Sumatera Barat adalah Pemda Kota Padang. Kota Padang tahun pertama operasional KJKS BMT pada tahun 2011 menunjukkan anggota pembiayaan RTM yang dapat terlayani mencapai 8.254 KK, dengan menggunakan data RTM tahun 2008 jumlah RTM di Kota Padang sebanyak 51.700 KK, hal ini menunjukkan sekitar 15,97% RTM yang dapat terlayani oleh KJKS BMT di Kota Padang (sumber: BPM-PK Kota Padang, 2011).

Berdasarkan ilustrasi di atas tahapan setelah operasionalisasi anggaran program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang handal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya suatu program/kegiatan (Mardiasmo,

2009). Program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT sudah berjalan selama 5 tahun (tahun 2010 sampai dengan tahun 2015) di Kota Padang, dan untuk melihat tingkat keberhasilan program maka perlu dilakukan penelitian dengan cara mengukur Kinerja Finansial dan Nonfinansial Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) di Kota Padang.

Kajian Literatur

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009) peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah penyediaan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (*task control*). Menurut Mardiasmo (2009) peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi: perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan (*cost of services*) dan penentuan tarif pelayanan (*charging for services*), dan penilaian kerja.

Definisi Kinerja

Dessler (2009), berpendapat kinerja karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi karyawan yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya.

Kane dan Johnson (dalam Afriana, 2009) menyimpulkan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, *outcome* hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 1 (35) kinerja adalah keluaran atau

hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dengan demikian dari konsep yang ditawarkan tersebut dapat dipahami bahwa kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Pengertian Kinerja Pemerintahan Daerah

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bertolak dari pengertian di atas maka kinerja pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksana suatu kegiatan/program/ kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (Soleh dan Suripto, 2011).

Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

- a. Kinerja Kebijakan
Kinerja kebijakan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah.
- b. Kinerja Program
Apabila kinerja kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka Kinerja Program menjadi tanggungjawab dari para Kepala SKPD.
- c. Kinerja Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terjadi atas satu atau lebih kegiatan.

Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Government Accounting Standard Board (GASB), dalam *Concept Statements No. 2*, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran *service efforts*, (2) indikator pengukuran *service accomplishment*, dan (3) indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment*. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan mem- perbaiki komunikasi kelembagaan.

Definisi Kemiskinan

Umumnya ketika orang berbicara mengenai kemiskinan maka yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokoknya agar dapat hidup secara layak. Berikut ini adalah beberapa pengertian kemiskinan:

1. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum. Baik untuk makan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002).
2. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan untuk memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk, 2004).
3. Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produktif, kesehatan), sumber keuangan (pekerjaan, kredit), organisasi soail dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan barang dan jasa, pengetahuan dan keterampilan, dan informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk, 2004).

Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 15 Tahun 2010, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi, dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT)

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) diartikan sebagai rumah harta dan pengembangan keuangan. Menurut Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu.

Review Penelitian Sebelumnya

Pengukuran kinerja dibagi dalam tiga kategori indikator, yaitu indikator pengukuran *service efforts*, indikator pengukuran *service accomplishment*, dan indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment*. Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (*explanatory information*). Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apa efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut. Dalam hal ini dicatat adanya manfaat pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan Informasi mengenai kinerja pemerintah akan dapat digunakan untuk: Menetapkan sasaran dan tujuan program tertentu, Merencanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut, Mengalokasi sumber daya untuk pelaksanaan program, Memonitor dan mengevaluasi *results*, Memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja.

Seperti halnya dengan keterbatasan pelaporan pengukuran kinerja lainnya, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh para pengguna pelaporan pengukuran kinerja ini agar informasi yang didapatkan dapat digunakan sebaik-baiknya. Penelitian Perwitasari (2010) menjelaskan bahwa *Service efforts* adalah bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam. Lebih lanjut, *service accomplishment* diartikan sebagai prestasi dari program tertentu. Berdasarkan GASB (1994) bahwa penilaian efisiensi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara *service efforts* dan *service accomplishment*.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh hasil empiris. Penelitian deskriptif merupakan metode

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya

dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta karakteristik objek/subjek yang diteliti secara tepat (Sukardi, 2008).

Tabel 3
Indikator Pengukuran Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT di Kota Padang

Indikator	Tolok Ukur
Indikator Masukan	Jumlah Nagari/ Kelurahan lokasi program. Dana penyertaan/sharing. Keluarga miskin penerima manfaat program. Peran keluarga miskin sebagai pengelola program. Partisipasi keluarga miskin dalam pengambilan keputusan. Keluarga miskin perempuan yang berpartisipasi. Tenaga pendamping. Bantuan teknis dari dinas/instansi sektoral atau pelaku pembangunan lainnya. Keswadayaan masyarakat dalam program. Pendayagunaan sumber lokal. Dukungan kebijakan. Pengawasan fungsional dan struktural. Pengawasan langsung masyarakat. Dukungan administrasi dalam pengelolaan program.
Indikator Proses	Pelaksanaan sosialisasi Kab/Kota. Pelatihan, mobilisasi dan pengendalian pendamping masyarakat/koordinator pendamping masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi Nagari/Kelurahan. Pelaporan, pengawasan, monev, dan pendampingan. Penyiapan kapasitas masyarakat untuk pelestarian.
Indikator Keluaran	Pemahaman terhadap program. Kejelasan dan ketepatan keluarga miskin sebagai sasaran program.
Indikator Dampak	Perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan tersedianya kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan mutu sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Peningkatan sarana/prasarana Nagari/Kelurahan. Pengembangan usaha masyarakat Nagari/Kelurahan. Penguatan kelembagaan KJKS BMT dan kelembagaan lainnya.

Sumber: Pendum Program PK Melalui KJKS BMT di Kota Padang

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Propinsi Sumatera Barat, BPM-PK Kota Padang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Lembaga KJKS BMT di Kota Padang, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat untuk memperoleh informasi tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT.

Operasionalisasi Variabel

1. Kinerja Finansial

Penilaian kinerja finansial diukur dengan menganalisis selisih antara kinerja aktual dengan realisasi anggaran. Penilaian kinerja finansial berdasarkan pada realisasi anggaran yang diterima oleh setiap unit KJKS BMT berdasarkan program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kabupaten Agam dan Kota Padang yang berupa Belanja Hibah Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat

dan Kota Padang (*specific grant*), di mana pada lembaga KJKS BMT diakui sebagai modal penyertaan nagari/kelurahan. Sedangkan kinerja aktual adalah keseluruhan perkembangan Aset di KJKS BMT setelah direalisasinya anggaran program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT.

2. Kinerja Nonfinansial.

Kinerja nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja nonfinansial.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas/SKPD terkait yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPM-PK) Kota Padang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Sekretariat KJKS BMT Kota Padang, dan Lembaga KJKS BMT yang dibentuk melalui program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, Rumah

Tangga Miskin (RTM) di Kota Padang yang terdaftar dalam database penduduk miskin yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini yang sesuai dengan karakteristik adalah kepala badan/bidang Dinas Koperasi dan UMKM/Koordinator Program, Koordinator Pendamping/Pendamping Masyarakat, Pengurus dan Pengelola KJKS BMT, dan Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang.

Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *sampling non-probabilitas* dengan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Elemen populasi yang diambil sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan pertimbangan. Dikarenakan terlalu luas daerah dan jumlah KJKS BMT yang cukup banyak yaitu sebanyak 54 KJKS BMT di Kota Padang. Maka peneliti membatasi jumlah KJKS BMT yang diteliti dengan spesifik, yaitu KJKS BMT Model berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat Program Penanggulangan Kemiskinan (PPK) Melalui KJKS Kota Padang. Maka peneliti membatasi jumlah KJKS BMT yang akan diteliti dengan spesifik, yaitu KJKS BMT Model berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat Program Penanggulangan Kemiskinan (PPK) Melalui KJKS Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Data Sampel dan Responden KJKS BMT di Kota Padang

Sampel KJKS BMT	Kondisi Kesehatan	Jumlah Responden	
		Pengelola/ RTM Penerima	Manfaat Program
Panggambiran	Sehat	2	3
Ampalu Nan XX			
Batung Taba	Sehat	2	3
Cengkeh Nan XX	Sehat	2	3
Padang Besi	Sehat	2	3
Kubu Dalam Parak	Sehat	2	3
Karakah			
Seberang Padang	Sehat	2	3
Berok Nipah	Sehat	2	3
Ujung Gurun	Sehat	2	3
Korong Gadang	Sehat	2	3
Anduring	Sehat	2	3
Jumlah		20	30

Sumber: Data diolah dari Sekretariat PPK Melalui KJKS BMT di Kota Padang

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999). Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Kepala Badan/Bidang BPM/Koordinator Program, Pengurus dan Pengelola KJKS BMT, dan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dilayani oleh program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT Kota Padang. Di mana instrumen wawancara mengacu pada indikator dan tolok ukur kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT.
2. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan (Indriantoro dan Supomo (1999). Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain: gambaran umum Kota Padang, struktur organisasi KJKS BMT; Data realisasi anggaran program; laporan keuangan KJKS BMT, data anggota/nasabah KJKS BMT, dan Data Rumah Tangga Miskin (RTM), dan data lain yang mendukung kegiatan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara semi terstruktur, melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan pertanyaan terbuka dan memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan baru yang timbul dari jawaban orang yang diwawancarai, dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan, yaitu: Kepala Badan/Bidang BPM/Koordinator Program, Pengurus dan Pengelola KJKS BMT, dan Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang.
2. Teknik dokumentasi, dengan melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik observasi, observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan ciri dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009). Untuk informasi finansial menggunakan analisis varians (selisih) dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians} = \text{Kinerja Aktual} - \text{Realisasi Anggaran}$$

Untuk pengukuran kinerja berdasarkan informasi nonfinansial diukur berdasarkan indikator program, meliputi indikator masukan, proses, keluaran dan dampak, kemudian data yang diperoleh melalui wawancara langsung ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis data meliputi:

1. Penilaian data. Data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip validitas, objektivitas, reliabilitas melalui cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kertas kerja penilaian, diolah dengan ketentuan sebagai berikut: atribut

penilaian, persentase hasil penilaian dan ukuran penilaian. Dari persentase hasil penilaian yang diperoleh dapat disimpulkan ukuran penilaian dengan kriteria seperti pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Persentase dan Ukuran Penilaian

Persentase Penilaian	Ukuran Penilaian
0% s/d 25%	Kurang
26% s/d 50%	Cukup
51% s/d 75%	Baik
76% s/d 100%	Sangat Baik

2. Interpretasi data, yang dilakukan dengan cara menganalisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan dan disederhanakan dalam bentuk analisis tabel.
3. Penyimpulan terhadap hasil interpretasi data.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat menjawab berbagai masalah menyangkut pertanyaan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kinerja Finansial

Dalam penelitian ini metode analisis mengacu pada pengukuran kinerja berdasarkan informasi finansial dan informasi nonfinansial. Pada bagian ini dibahas mengenai kinerja finansial dengan menggunakan analisis *varians* (selisih). Data yang dapat diolah dan dianalisis mulai dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh yang telah diolah, maka kinerja finansial program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang selama 5 tahun tergambar pada tabel berikut.

Tabel 6
Kinerja Finansial Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT di Kota Padang

Tahun	Kinerja Aktual (Asset)	Realisasi Anggaran	Varians (Selisih)	(%)
31-Des-10	Rp -	Rp16.200.000.000	Rp -	0,00
31-Des-11	Rp20.632.770.271	Rp16.200.000.000	Rp4.432.770.271	27,36
31-Des-12	Rp21.842.452.816	Rp16.200.000.000	Rp5.642.452.816	34,83
31-Des-13	Rp29.028.387.600	Rp19.937.387.029	Rp9.091.000.571	45,60
31-Des-14	Rp31.901.604.341	Rp20.283.687.002	Rp11.617.917.339	57,28
31-Des-15	Rp34.207.316.489	Rp20.657.234.585	Rp13.550.081.904	65,59

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa kinerja finansial program penanggulangan kemiskinan

melalui KJKS BMT Kota Padang yang cukup baik terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 27,36% dengan

peningkatan aset tahun pertama mencapai 27,36%, bila di bandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia angka ini cukup baik karena rata-rata peningkatan aset LKMS pertahunnya adalah sebesar 30%. Untuk tahun 2012 kinerja finansial sebesar 34,83%, tahun 2013 sebesar 45,60%, tahun 2014 sebesar 57,25% dan tahun 2015 sebesar 65,59%, dengan rata-rata peningkatan aset selama 5 tahun sebesar 13,12%.

Analisis Kinerja Nonfinansial

Pada bagian ini membahas mengenai kinerja nonfinansial di mana dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. Jenis informasi nonfinansial dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variable*), yaitu indikator kinerja yang meliputi aspek masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan dampak (*impact*), dengan indikator yang dibangun berpedoman pada panduan umum program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang. Agar dapat memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan teknik wawancara dengan tanya jawab langsung secara lisan dengan pertanyaan terbuka kepada beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan, yaitu: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang/Kepala Bidang/Koordinator Sekretariat Program, Pengurus dan Pengelola KJKS BMT, dan RTM penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang. Adapun data responden yang telah diwawancarai berdasarkan indikator yang ada adalah untuk indikator masukan (*input*) dan proses sebanyak 1 responden dan indikator keluaran (*output*) dan dampak sebanyak 50 responden.

Indikator Masukan (Input)

Tabel 7 menunjukkan kesimpulan analisis terhadap indikator masukan (*input*). Indikator masukan (*input*) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan dalam program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan. Dari 14 tolok ukur indikator masukan (*input*) hasil penilaian di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang telah menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keluaran

yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya dengan sangat baik.

Tabel 7
Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Masukan (Input)

Tolok Ukur	Analisis/ Kesimpulan
Jumlah Kelurahan/Nagari lokasi program.	100% Sangat Baik
Dana penyertaan/sharing.	100% Sangat Baik
Keluarga miskin penerima manfaat program.	80% Sangat Baik
Peran keluarga miskin sebagai pengelola program.	0% Kurang
Partisipasi keluarga miskin dalam pengambilan keputusan.	100% Sangat Baik
Keluarga miskin perempuan yang berpartisipasi.	80% Sangat Baik
Tenaga pendamping.	25% Kurang
Bantuan teknis dari dinas/instansi sektoral atau pelaku pembangunan lainnya.	75% Baik
Keswadayaan masyarakat dalam program.	225% Sangat Baik
Pendayagunaan sumber lokal.	100% Sangat Baik
Dukungan kebijakan.	100% Sangat Baik
Pengawasan fungsional dan struktural.	50% Cukup
Pengawasan langsung masyarakat.	50% Cukup
Dukungan administrasi dalam pengelolaan program.	100% Sangat Baik
Jumlah Penilaian Indikator Masukan (input)	1136%
Jumlah Tolok Ukur 14	81,14% Sangat Baik

Sumber Data Diolah

Indikator Proses

Tabel 8
Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Proses

Tolok Ukur	% Hasil Penilaian	Analisis/ Kesimpulan
Pelaksanaan sosialisasi Kota/Kabupaten.	100%	Sangat Baik
Pelatihan, mobilisasi dan pengendalian pendamping masyarakat/koordinator pendamping masyarakat.	50%	Kurang
Pelaksanaan sosialisasi Kelurahan/Nagari	100%	Sangat Baik
Pelaporan, pengawasan, monev, dan pendampingan	50%	Kurang
Penyiapan kapasitas masyarakat untuk pelestarian.	70%	Baik
Jumlah Penilaian Indikator Proses	370%	
Jumlah Tolok Ukur 5	74%	Baik

Sumber Data Diolah

Tabel 8 menunjukkan kesimpulan analisis terhadap indikator proses. Dari 5 tolok ukur indikator proses persentase penilaiannya adalah 74% yang berarti baik. dari hasil penilaian di atas hal yang mempengaruhi penilaian baik adalah sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Padang melalui BPM-PK

Kota Padang dan Koordinator Pogram dalam penyiapan kapasitas masyarakat untuk pelestarian sehingga diharapkan akan terjadi keberlangsungan program ke depan. Setelah program sudah berlangsung dan KJKS BMT sudah berdiri dan berbadan hukum maka program dipindahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang hal ini juga diharapkan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Koperasi dan UMKM akan mempengaruhi keberlangsungan program.

Indikator Keluaran (Output)

Tabel 9

Kesimpulan Hasil Analisa Indikator Keluaran (Output)

Tolok Ukur	% Hasil Penilaian	Analisis/ Kesimpulan
Pemahaman terhadap program	80%	Sangat Baik
Kejelasan dan ketepatan keluarga miskin sebagai sasaran program	100%	Sangat Baik
Jumlah Penilaian Indikator Keluaran (Output)	190%	
Jumlah Tolok Ukur 2	90%	Sangat Baik

Sumber Data Diolah

Tabel 9 menunjukkan kesimpulan analisis terhadap indikator keluaran. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Dari 2 tolok ukur indikator keluaran persentase penilaiannya adalah 90% yang berarti sangat baik. Tingginya hasil penilaian indikator keluaran ini tidak lepas dari pengaruh tingginya hasil penilaian indikator masukan.

Indikator Dampak

Tabel 10 menunjukkan kesimpulan analisis terhadap indikator dampak. Indikator dampak (*impact*) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu program/kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian. Dari 6 tolok ukur indikator dampak persentase penilaiannya adalah 66,67% yang berarti baik. Dari hasil penilaian ini dapat disimpulkan selama kurang lebih 5 (lima) tahun program berjalan sudah memberikan manfaat yang baik terhadap peningkatan pendapatan keluarga miskin, peningkatan mutu sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan, peningkatan mutu

sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan, peningkatan sarana/prasarana kelurahan, pengembangan usaha masyarakat kelurahan, dan penguatan kelembagaan KJKS BMT dan kelembagaan lainnya.

Tabel 10
Kesimpulan Hasil Analisa Indikator Dampak

Tolok Ukur	% Hasil Penilaian	Analisis/ Kesimpulan
Perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga miskin.	70%	Baik
Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan tersedianya kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.	60%	Baik
Peningkatan mutu sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan.	50%	Cukup
Peningkatan sarana/prasarana kelurahan.	82%	Sangat Baik
Pengembangan usaha masyarakat kelurahan.	74%	Baik
Penguatan kelembagaan KJKS BMT dan kelembagaan lainnya.	64%	Baik
Jumlah Penilaian Indikator Dampak	400%	
Jumlah Tolok Ukur 6	66,67%	Baik

Sumber Data Diolah

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disampaikan simpulan bahwa kinerja finansial program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terjadi peningkatan setiap tahunnya, di mana kondisi yang cukup baik terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 27,36% hal ini menunjukkan peran antusias masyarakat untuk memenuhi dana pendampingan atau dana pendirian awal sangat besar. Untuk tahun 2012 kinerja finansial sebesar 34,83%, tahun 2013 sebesar 45,60%, tahun 2014 sebesar 57,25% dan tahun 2015 sebesar 65,59%, dengan rata-rata peningkatan aset selama 5 tahun sebesar 13,12%. Untuk meningkatkan kinerja finansial dapat dilakukan dengan upaya peningkatan aset yang bersumber dari masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan jumlah penghimpunan dana (*founding*) dalam bentuk simpanan/tabungan, karena penghimpunan dana masyarakat ini merupakan sumber dana murah yang sangat efektif dalam meningkatkan aset KJKS BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Upaya lainnya bisa bersumber dari pembiayaan dari pihak ketiga seperti perbankan, LPDP, modal ventura, dana *Cooperate Social*

Responsibility (CSR), dan mensinergikan antar program yang ada di Nagari/Kelurahan dengan *target group* yang sama seperti program pemberian modal lunak yang diberikan oleh BASDA, program perumahan masyarakat miskin dari Menpera, dan lain-lain, untuk mensinergikan berbagai program ini perlu adanya dukungan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan kabupaten/kota.

Kinerja nonfinansial dengan menggunakan indikator masukan (*input*) dengan jumlah tolok ukur sebanyak 14 item. Indikator masukan (*input*) persentase penilaiannya adalah sebesar 81,14% yang berarti sangat baik. Maka hal ini berarti dari 14 tolok ukur indikator masukan (*input*) hasil penilaian diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang telah menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya dengan sangat baik. Indikator proses didapat dari 5 tolok ukur, dari 5 tolok ukur indikator proses persentase penilaiannya adalah 74% yang berarti baik. dari hasil penilaian di atas hal yang mempengaruhi penilaian baik adalah sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Padang melalui BPM-PK Kota Padang dan Koordinator Pogram dalam penyiapan kapasitas masyarakat untuk pelestarian sehingga diharapkan akan terjadi keberlangsungan program kedepan. Setelah program sudah berlangsung dan KJKS BMT sudah berdiri dan berbadan hukum maka program dipindahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang hal ini juga diharapkan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Koperasi dan UMKM akan mempengaruhi keberlangsungan program. Kinerja nonfinansial dengan menggunakan indikator keluaran (*output*), Dari 2 tolok ukur indikator keluaran persentase penilaiannya adalah 90% yang berarti *Sangat Baik*. Tingginya hasil penilaian indikator keluaran ini tidak lepas dari pengaruh tingginya hasil penilaian indikator masukan. Kinerja nonfinansial dengan menggunakan indikator dampak. Dari 6 tolok ukur indikator dampak persentase penilaiannya adalah 66,67% yang berarti baik. Dari hasil penilaian ini dapat disimpulkan selama kurang lebih 5 (lima) tahun program berjalan sudah memberikan manfaat yang baik terhadap peningkatan pendapatan keluarga miskin, peningkatan mutu sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan, peningkatan mutu sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan, peningkatan sarana/prasarana kelurahan, pengembangan usaha masyarakat kelurahan, dan penguatan kelembagaan KJKS BMT dan kelembagaan lainnya.

References

- Afriana. (2009). Analisis Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto). *Tesis S-2*. Unand (tidak dipublikasikan).
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. *Padang Dalam Angka 2010-2011*.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Padang 2010*.
- BPM-PK Kota Padang. (2010). *Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan Melalui Pengembangan KJKS BMT (PKPB-MPB)*.
- Dessler, G. (2009). *Manajemen SDM. Buku 1*. Indeks: Jakarta.
- Elfindri, Munandar, & Aristo. (2009). *Makmur Bersama Masjid: Refleksi Pembangunan Masyarakat Madani*. Penerbit Baduose Media, Jakarta.
- Elfindri, dkk. (2007). *Rahasia Sukses Membangun Daerah*. Penerbit Baduose Media, Jakarta.
- Fadillah, M. N., & Mukhtar. (2004). Proses Penyusunan Anggaran dan Pengalokasian Belanja di Pemda Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 19(1), 27-56.
- Indriantoro, N., & Bambang, S. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan Pertama. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mangu, M. (2004). *Evaluasi Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama, Cetakan Keempat, ANDI, Yogyakarta.
- Ramandei, P. (2009). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah. *Tesis S-2*, Program Pascasarjana, UNDP, (tidak dipublikasikan).
- Sartika, D. (2013). Analisis Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT (Studi Pada Kabupaten Agam dan Kota Padang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, STIE Agus Salim: ISSN: 1978-6403.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta, Bandung.
- Soleh & Satripto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. Cetakan Pertama, Fokusmedia, Bandung.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Balai Diklat Keuangan III.
- _____. (2007). Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah.
- _____. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- _____. (2010). Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui

Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal
Wat Tamwil Padang Amanah Sejahtera.